

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank mempunyai andil dan peran yang cukup berpengaruh dalam perekonomian. Bank merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat, mampu menjaga dana yang dititipkan dengan aman. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, giro maupun deposito. Selain menghimpun dana bank pun, melakukan kegiatan dalam penyaluran dana kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan seperti pembiayaan rumah, pembiayaan multijasa, pembiayaan mikro serta pembiayaan lainnya.<sup>1</sup> Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Berkembangnya aspek syariah belakangan ini, membuat berbagai aspek dalam kehidupan pun bertemakan syariah. Seperti dalam dunia keuangan, mulai berkembangnya perbankan syariah.

Terjadinya krisis moneter tahun 1997 pun ikut menyongsong tumbuh kembangnya bank syariah. Karena pada saat itu, bank konvensional mengalami ketidakstabilan akibat terjerat bunga yang terus meningkat. Akan tetapi berbeda

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 38.

dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, bank syariah tidak terjerat dengan bunga. Sehingga, hal ini membuat bank syariah mampu bertahan dalam kondisi demikian. Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, semakin memperluas kesempatan bagi perbankan syariah untuk berkembang. Bank syariah dalam melakukan kegiatannya, baik menghimpun dana, menyalurkan dana atau pun pemberian jasa identik dengan menggunakan akad. Akad ada dua jenis, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* adalah semua jenis perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang tidak mengutamakan keuntungan dalam pelaksanaannya (*not-for profit transaction*). Pada hakikatnya akad *tabarru* bukanlah akad untuk transaksi bisnis yang mencari keuntungan, akad *tabarru* bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.<sup>2</sup>

Akad *tabarru* dilakukan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah dan juga untuk membantu pihak yang membutuhkan. Sedangkan akad *tijarah* adalah kebalikan dari akad *tabarru*, akad ini merupakan akad yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencari keuntungan (*for profit transaction*). Contoh akad *tijarah* di antaranya seperti dalam investasi, jual-beli dan sewa-menyewa.<sup>3</sup> Seperti di BRI Syariah KCP Rancaekek, sebagai lembaga keuangan

---

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 66.

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 70.

tentunya mempunyai produk pembiayaan jual-beli, dengan menggunakan akad *murabahah*.

Akad *murabahah* adalah akad yang sering digunakan dalam pemberian pembiayaan di bank syariah.<sup>4</sup> Selain karena lebih menguntungkan, juga karena lebih praktis. Akad *murabahah* merupakan salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan.<sup>5</sup> Akad *murabahah* pun diterapkan dalam pembiayaan UMS di BRI Syariah.<sup>6</sup> UMS adalah singkatan dari Unit Mikro Syariah yang merupakan produk pemberian pembiayaan terhadap pengusaha-pengusaha kecil sehingga mampu mengembangkan dan menjalankan usahanya dengan baik. *Murabahah* adalah penjualan dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan keduanya.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaannya BRI Syariah KCP Rancaekek mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan positif yang berlaku, serta Fatwa DSN MUI.

## B. Rumusan Masalah

Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk memudahkan pelaksanaan operasional bank, juga untuk mempermudah bank mencapai tujuannya. Dalam pembiayaan *murabahah*, bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Bank sebagai penjual tentunya ingin

---

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 128

<sup>5</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 227.

<sup>6</sup>BRI Syariah, *Buku Panduan Produk BRI Syariah*, hlm. 23.

<sup>7</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 226.

mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan dengan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah yang dianutnya. Akan tetapi, dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun, dalam kebijakan penetapan *margin* berdasarkan *plafondnya*. Terdapat kalimat “Pembiayaan Rp75 juta sampai Rp200 juta, *margin* yang diterima oleh bank adalah 1% sampai dengan 1,5% per bulan sedangkan pembiayaan Rp200 juta sampai dengan Rp500 juta, *margin* yang diterima bank adalah 0,9% sampai dengan 1,2% per bulan”. Artinya semakin banyak uang yang dipinjam, persentase *margin* semakin mengecil. Sedangkan semakin sedikit *plafondnya* maka persentase *marginnya* semakin besar. Bank lebih meringankan pengusaha besar, dari pada para pengusaha kecil. Sehingga terdapat perbedaan dengan teori dari bank syariah sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal ini. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merumuskannya dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad pembiayaan *murabahah* dalam produk Unit Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Rancaekek?
2. Mengapa BRI Syariah menentukan *margin* yang berbeda terhadap *plafond* besar dan *plafond* kecil?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* pada produk Unit Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Rancaekek?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *murabahah* pada produk Unit Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Rancaekek.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai mekanisme penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* pada produk Unit Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Rancaekek.
3. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* pada produk Unit Mikro Syariah di BRI Syariah KCP Rancaekek.

### D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis  
Mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan pembahasan yang sama. Namun dengan metode penelitian yang berbeda. Sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis  
Mampu memberikan informasi serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam penetapan *margin*.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian dan menulis, penulis melakukan peninjauan mengenai beberapa skripsi terdahulu yang mana membahas ruang lingkup yang hampir sama. Sehingga penulis menjadikan skripsi terdahulu tersebut sebagai sumber pengetahuan dan rujukan dalam melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Rancaekek. Adapun beberapa skripsi terdahulu yang menjadi rujukan penulis diantaranya, skripsi yang dibuat oleh Asri Ratna Dewi pada tahun 2014 dengan judul “Penetapan *Margin* Secara *Flat* dalam Produk Pembiayaan Griya Melalui Akad *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya” yang memaparkan mengenai penetapan *margin* bank syariah yang masih mengacu pada bank konvensional sehingga diragukan masih adanya bunga. Dari skripsi ini terdapat perbedaan kajian yang dibahas, tempat yang dijadikan penelitian, serta skripsi ini lebih menitik beratkan pada perhitungan yang digunakan bank syariah.<sup>8</sup>

Kemudian skripsi yang dibuat oleh Ahmad Jaelani dengan judul skripsi “Analisis terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur” tahun 2015. Dimana, lebih menjelaskan mengenai prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan mikro di bank syariah. Dari skripsi ini terdapat perbedaan kajian yang dibahas serta cara penelitian yang dilakukan.

Skripsi selanjutnya yang penulis jadikan rujukan ialah skripsi yang dibuat oleh Riki Erwinda tahun 2017 dengan judul “Penetapan *Margin* dalam Program

---

<sup>8</sup>Asri Ratna Dewi, *Penetapan Margin Secara Flat dalam Produk Pembiayaan Griya Melalui Akad Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014).

*Amazing Price* pada Produk KPR BSM Griya dengan Akad *Murabahah* di BSM KC Ahmad Yani” yang memaparkan mengenai penetapan *margin*, adanya tambahan lain dalam penetapan harga jualnya serta menganalisisnya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah*. Dari skripsi ini terdapat perbedaan kajian yang dibahas, tempat penelitian serta tinjauan yang digunakan.<sup>9</sup>

Selain dari skripsi, penulis juga menjadikan beberapa jurnal sebagai rujukan dalam penulisan diantaranya seperti jurnal yang dibuat oleh Lukman, Amri, dan Rahman Khairunnisa tahun 2016 dengan judul “Rekontruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan *Margin Murabahah* di PT. Amanah Finance Makassar” yang memaparkan ketentuan-ketentuan dalam penentuan *margin murabahah* yang sesuai dengan syar’i. Dari jurnal ini, terdapat perbedaan kajian dengan yang penulis teliti. Peneliti lebih menitik beratkan kepada kenyataan yang terjadi dilapangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>10</sup>

Jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang dibuat oleh Fithria Aisyah Rahmawati, dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan *Margin Murabahah* di BMT Se-Kabupaten Jepara”. Yang disusun pada tahun 2015. Dalam jurnal terdapat perbedaan dengan penulis yaitu penulis lebih menitik beratkan kepada *margin murabahah* yang ditetapkan sedangkan jurnal yang

---

<sup>9</sup>Riki Erwinda, *Penetapan Margin dalam Program Amazing Price pada Produk KPR BSM Griya dengan Akad Murabahah di BSM KC Ahmad Yani*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017).

<sup>10</sup>Lukman, Amri, dan Rahman Khairunnisa, “Rekontruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan *Margin Murabahah* di PT. Amanah Finance Makassar” *FENOMENA*, 2016, Volume. 8, No 2.



diajadikan acuan lebih kepada kenyataan yang terjadi dilapangan yang masih belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>11</sup>

Tabel 1.1

## Studi Terdahulu

No.	Nama	Tahun	Judul	Perbedaan
1.	Asri Ratna Dewi	2014	Penetapan <i>Margin</i> Secara <i>Flat</i> dalam Produk Pembiayaan Griya Melalui Akad <i>Murabahah</i> di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya	Adanya bunga dalam penetapan <i>margin</i> karena bank masih mengacu pada suku bunga. jual beli di bank syariah masih sama dengan bank konvensional.
2.	Ahmad Jaelani	2015	Analisis terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur	Menjelaskan mengenai prosedur pemberiandan pengajuan pembiayaan mikro di bank syariah
3.	Riki Erwinda	2017	Penetapan <i>Margin</i> dalam Program <i>Amazing Price</i> pada Produk KPR BSM Griya dengan Akad <i>Murabahah</i> di BSM KC Ahmad Yani	Adanya sangkaan pembiayaan yang dilakukan dengan adanya tambahan lain dalam penetapan harga jualnya
4.	Lukman, Amri, dan Rahman Khairunnisa.	2016	Rekontruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan <i>Margin Murabahah</i> di PT. Amanah Finance Makassar	Jurnal lebih memaparkan mengenai ketentuan-ketentuan dalam penentuan <i>margin murabahah</i> yang sesuai dengan syar'i

Lanjutan Tabel 1.1

<sup>11</sup>Fithria Aisyah Rahmawati, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan *Margin Murabahah* di BMT Se-Kabupaten Jepara", *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah*, 2015, Volume. 3 No. 2.



5.	Fhitria Aisyah Rahmawati	2015	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan <i>Margin Murabahah</i> di BMT Se-Kabupaten Jepara	Lebih menganalisa mengenai faktor yang mempengaruhi penetapan <i>margin</i>
----	--------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

## F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi.<sup>12</sup> Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika.<sup>13</sup> Kegiatan ekonomi yang diperbolehkan syariah Islam yaitu yang tidak mendukung baik kapitalisme atau komunisme. Prinsip ini terutama berdasarkan pada pelarangan atas bunga (riba), mempergunakan transaksi yang diperbolehkan (halal) dan menghindari transaksi yang dilarang (haram), pelarangan dalam kontrak yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), termasuk spekulasi atau perjudian (*maisir*) dan pembayaran zakat.<sup>14</sup> Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika di samping juga dengan hukum-hukum Islam. Sehingga, ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi

<sup>12</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 16-19.

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 47.

<sup>14</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 30.

syariah adalah konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah diantaranya:<sup>15</sup>

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sebenarnya tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima *mashlahat*, yaitu keimanan (*ad dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nash*). Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai itu harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip inilah yang akan membuat bangunan

---

<sup>15</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 4.

ekonomi syariah kokoh dan dinamis dan nilai berfungsi mewarnai kualitas bangunan tersebut.<sup>16</sup> Adapun beberapa prinsip dari ekonomi syariah diantaranya:

#### 1. Prinsip Tauhid

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Menurut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan, tauhid merupakan prinsip hukum Islam, disamping keadilan. Artinya hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakkan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniya, menolong fakir miskin dan senantiasa melakukan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Hukum Allah bersifat universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. namun demikian, dalam tataran operasional ia bersifat fleksibel. Perwujudan *rahmat* Allah SWT dalam Undang-Undang terletak dalam sejumlah peraturan/norma yang dimuat dalam pasal dan ayat-ayatnya yang berorientasi kepada peningkatan bidang ekonomi yang berbasis syariah. prinsip-prinsip itu di antaranya larangan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, dan haram.

Ketika seorang muslim hendak membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, menginvestasikan uang, ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli milik rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap-menyuap. Seorang muslim secara tegas menjauhi daerah yang diharamkan Allah, di samping berusaha

---

<sup>16</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 54-58.

semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu yang *syubhat*. Seorang muslim seharusnya sangat paham terhadap segala perintah dan larangan Allah. Pemiikan harta yang ada padanya bukanlah secara mutlak sehingga ia tidak berhak untuk membelanjakan harta itu sesuka hatinya.<sup>17</sup>

## 2. Prinsip Keadilan

Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Tujuan nasional dalam ranah ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah. Keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran, oleh karena itu kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia di bidang ekonomi yang ingin dicapai oleh pembangunan nasional dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nilai-nilai keadilan dalam aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS, terdapat dalam keberagaman akad yang digunakan. Keberagaman akad yang dipergunakan dalam kegiatan usaha perbankan dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian dan harmonisasi dengan jenis kegiatan yang beraneka ragam serta didasarkan atas kebutuhan setiap kegiatan usaha secara proporsional.

---

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 46.

Nilai keadilan tidak akan bermakna jika tidak direalisasikan dalam tataran operasional perbankan syariah. Hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi di tengah keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.<sup>18</sup>

### 3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Adapun tiang yang menopang tegaknya *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* adalah sumber pengambilan bahan baku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oleh karena itu materi Undang-Undang ini disifati dan meliputi, norma *ma'ruf* dan *munkar*. Norma *al-amr bi ma'ruf* hukum Islam diterjemahkan Undang-Undang dalam bentuk keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha perbankan syariah, sedangkan norma *al-nahy 'an al-munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku perbankan syariah.

Tujuan dari *al-amr bi ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki kesamaan, yang pertama bertujuan teraihnya keberuntungan (*falah*). Adapun yang kedua bertujuan tegaknya

---

<sup>18</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 51.

keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hakikat dan tujuan ini harus dicapai dengan berpedoman kepada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten.<sup>19</sup>

Kegiatan *muamalah* hendaklah harus memenuhi 4 prinsip *muamalah*, yaitu diantaranya:<sup>20</sup>

1. Pada asalnya *muamalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-muamalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil 'ala tahrim*);
2. *Muamalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'antaradhim*)
3. *Muamalah* yang dilakukan hendaknya dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *mudharat*.
4. Dalam *muamalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezhaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara'*.

Selain prinsip yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional pun yaitu dengan penggunaan akad pada setiap pengoperasiannya. Akad adalah penguatan, ikatan, keputusan, kesepakatan, atau perjanjian atau transaksi yang didasari dengan prinsip-prinsip syariah. akad secara bahasa adalah "*ar-rabthu*" yang artinya mengaitkan atau menghubungkan. Mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Secara bahasa akad dapat diartikan sebagai ikatan yang mengikat beberapa pihak.<sup>21</sup> Dalam istilah fiqh, akad secara umum ialah sesuatu yang menjadi tekad seseorang atau lebih untuk melakukan, baik yang muncul dari

<sup>19</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 146-157.

<sup>20</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-131.

<sup>21</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47-48.

satu pihak seperti wakaf, talak dan sumpah. Maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa, wakalah dan gadai. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. *Ijab* ialah pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan sedangkan *qabul* ialah pernyataan penerimaan atau kepemilikan.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap akad (persetujuan mencakup tiga tahapan, yaitu:

1. Perjanjian (*'ahdu*).
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih.
3. Perikatan (*'aqdu*).

Rukun dapat diartikan unsur pokok yang harus ada dan merupakan bagian dari hakekat. Atau dapat juga diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi rukun dalam akad yaitu diantaranya sebagai berikut

1. *'Aqid* ialah pihak yang berakad, kadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Pihak yang berakad mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. *Ma'qud'alaih* ialah barang atau benda yang menjadi objek akad. Seperti barang yang akan disewakan atau dijual.

---

<sup>22</sup>Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik temu Hukum Islam dan Hukum Nasional Edisi 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 35.

<sup>23</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 50.



3. *Maudhu'al'aqd* ialah maksud atau tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan akad. Berbeda tujuan maka beda jugalah akad yang digunakan.
4. *Shighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, bertukarnya sesuatu dengan sesuatu yang lain atau serah terima barang yang diakadkan.<sup>24</sup>

Akad yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatannya, terbagi menjadi 2 akad yaitu *tijarah* dan *tabarru*. Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pelaksanaannya (*tijarah*) sedangkan kegiatan yang bertujuan untuk tolong menolong tanpa mengharap imbalan (*tabarru*).

1. Akad *tijarah* ialah seluruh jenis perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akad ini bersifat komersil. Akad *tijarah* dibagi menjadi 2 yaitu *Natural Certainty Contracts (NCC)* dan *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*. *Natural Certainty Contracts (NCC)* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dengan saling mempertukarkan aset yang dimiliki. Oleh karena itu barang yang menjadi objek pertukaran harus pasti dan ditetapkan di awal akad. *Natural Certainty Contracts (NCC)* merupakan kontrak yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jualbeli dan sewa menyewa. Sedangkan *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* merupakan kontrak dimana setiap pihak saling mencampurkan aset yang dimilikinya sehingga menjadi satu kesatuan. Kontrak ini menerapkan penanggungungan risiko secara bersama-sama. *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* merupakan kontrak yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*),

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.

baik dari segi jumlah maupun waktu. yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi seperti akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*.

2. Akad *tabarru* ialah semua transaksi atau perjanjian yang mempunyai tujuan untuk tolong-menolong. Dalam akad ini pihak yang menolong tidak dapat imbalan dan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukannya. Secara umum bentuk akad *tabarru* terbagi menjadi 3 bagian yaitu meminjamkan uang yang mempunyai 3 jenis akad yaitu *qard*, *rahn* dan *hiwalah*. meminjamkan jasa dengan menggunakan akad *wakalah*, *wadiah* dan *kafalah* dan pemberian sesuatu yang menggunakan waqaf dan hibah.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Penulis mendeskripsikan yang terjadi di lapangan dengan memadukan bahan-bahan hukum mengenai penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* pada produk unit mikro syariah di BRI Syariah KCP Rancaekek. Adapun yang di maksud dengan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Penulis menyajikan data-data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian serta angka sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di BRI Syariah KCP Rancaekek.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif dengan didukung kuantitatif merupakan penelitian yang berhubungan erat dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti namun juga melibatkan data dalam bentuk angka dalam penelitiannya.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian yang telah penulis lakukan berupa hasil wawancara kepada Bapak Yuris Yuriandana selaku Manager Konsumer di BRI Syariah KCP Rancaekek, SOP dan Klausul Akad. Adapun yang dimaksud data primer yaitu sumber data utama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>27</sup>

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian penulis ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder ini didapat penulis dari media perantara berupa arsip atau dokumen yang menjadi alat bukti untuk menjawab masalah peneliti. Penulis pun menjadikan berbagai catatan, artikel serta buku-buku yang merupakan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai sumber data sekunder.

---

<sup>26</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 103.

<sup>27</sup>Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Cetakan 1*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan pada pihak terkait. Wawancara dapat dilakukan dengan dua teknik.<sup>28</sup>

- 1) Wawancara terstruktur, penulis menyusun beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, kemudian penulis mengajukan pertanyaan tersebut kepada Bapak Yuris Yuriandana.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang sifatnya lebih luwes dan terbuka. Pelaksanaannya lebih bebas dan pertanyaan ditanyakan pada informan secara spontan tanpa adanya pedoman pertanyaan yang disusun terlebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan Bapak Yuris Yuriandana.

##### b. Studi Dokumentasi

Sumber tertulis yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian, berupa klausul akad serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bank BRI Syariah KCP Rancaekek yang penulis jadikan sebagai studi dokumentasi.

##### c. Studi Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan mencari data dari berbagai buku, artikel, paper, dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan penelitian penulis. Yang mana hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai

---

<sup>28</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 163.

konsep, teori mengenai penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* pada produk unit mikro syariah di BRI Syariah KCP Rancaekek.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan dari mulai mencari dan menyusun data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, studi kepustakaan atau bahan lainnya. Sehingga mudah dimengerti dan temuan dapat di informasikan pada orang lain.<sup>29</sup> Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyuntingan, kegiatannya adalah memeriksa seluruh data yang diperoleh.
- b. Pengkodean, kegiatannya adalah pemberian kode yang dilakukan dengan cara pemberian simbol atau tanda pada data-data yang diperoleh.
- c. Tabulasi, adalah menyusun data yang telah diberi kode sebelumnya.
- d. Interpretasi/penafsiran adalah menafsirkan data-data yang telah diberi kode sehingga dapat dipahami, penafsiran ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang dilakukan.
- e. Penarikan kesimpulan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244.

<sup>30</sup>Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995), hlm 87-90.